

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menghindari kesalahan atas pemahaman judul, diberikan penegasan judul, yaitu:

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Upaya itu harus diikuti dengan memperkuat potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat.¹ Sedangkan pemberdayaan ekonomi itu adalah upaya untuk memotivasi mengarahkan yang ada segenap potensi untuk mencapai tujuan.²

Adapun maksud dalam pemberdayaan ekonomi disini adalah sebuah upaya yang secara langsung memberi dan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi dalam meningkatkan perekonomian yang didukung oleh pemerintah daerah dengan adanya modal untuk dipinjamkan lewat Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) “Lestari Makmur” kepada masyarakat .

¹ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO,1996), hal. 145

² Ma'ruf WS, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,1995), haL. 23

2. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.³ Tatanan kehidupan, norma-norma yang mereka miliki itulah yang menjadi dasar kehidupan sosial dalam lingkungan mereka, sehingga dapat membentuk suatu kelompok manusia memiliki ciri kehidupan yang khas. Dalam lingkungan itu antara orang tua dan anak, antara ibu dan ayah, antara kakek dan cucu. Antara sesama kaum laki-laki dan kaum wanita, larut dalam kehidupan yang teratur dan terpadu dalam suatu kelompok manusia, yang disebut masyarakat.

Yang dimaksud masyarakat disini adalah sekelompok orang yang terdiri dari beberapa individu yang terbentuk dalam keluarga dan menetap di Giwangan dan sekitarnya yang berbeda agama serta terdiri dari berbagai kalangan, terutama masyarakat ekonomi lemah dan pedagang kecil yang menjadi nasabah UED SP Lestari Makmur.

3. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP) “Lestari Makmur”

UED SP “Lestari Makmur” adalah lembaga ekonomi yang mempunyai tujuan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat Giwangan melalui unit simpan pinjam. UED SP “Lestari Makmur” dibentuk oleh pemerintah kelurahan Giwangan yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat.

³ Arifin Noor, *Ilmu Sosial Dasar*, Untuk IAIN semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 1997), hal. 85

mengembangkan potensi dalam mengembangkan perekonomian yang didukung oleh pemerintah kepada masyarakat Giwangan berupa modal usaha yang dipinjamkan melalui UED SP “Lestari Makmur“.

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di zaman orde baru telah menghasilkan berbagai kemampuan dan prestasi nasional secara substansial yang dipacu oleh serentetan pengalaman membangun pada setiap tahapnya, dari pelita ke pelita berikutnya. Dalam proses pembangunan itu, yang lebih berkemampuan bertambah maju dan yang kuat makin kuat, sebaliknya yang lemah lamban maju meskipun kemampuan setapak yang dicapainya mampu mengurangi jumlah kelompok miskin. Kelompok tertinggal ini sarat dengan berbagai kelemahan, terkurung oleh kondisi struktural.

Semenjak awal pembangunan nasional, upaya pemerataan, dan mengurangi proses perkembangan kesenjangan, selalu diperhatikan, hanya saja dasar-dasar kultural bagi terwujudnya pemerataan itu secara kokoh diletakkan. Sistem preferensi berupa subsidi dan proteksi selalu ada, namun paket-paket “strategi” pembangunan yang dipilih ataupun sikap budaya birokrasi yang berlaku menempatkan sistem preferensi yang ada itu justru sering jatuh diluar kelompok sasaran, akhirnya diterima oleh sekelompok yang kuat. Hal ini menumbuhkan suatu persepsi bahwa pemerataan hanyalah

sekedar sebagai upaya kolektif-akomodatif, bukan substantif. Terkadang tampak sebagai upaya marjinal, ibarat kosmetik, yang penuh *mediocrity*⁴.

Tanpa disadari akan hak-hak rakyat sesuai dengan paham kedaulatan rakyat, maka rakyat yang sebagian besar masih lemah ini akan menjadi “obyek” pembangunan. Dibalik pembangunan itu sering tersimpul kekuatan-kekuatan kelompok kepentingan tertentu. Upaya pembangunan haruslah langsung melibatkan rakyat dan mengikutsertakan rakyat, karena rakyat itulah yang kita bangun, sehingga pembangunan itu menjadi inklusif. Rakyat akan menjadi penonton, memisahkan dan menggeser diri dari proses pembangunan, disosiasif, antipartisipasi, bahkan mungkin memusuhinya, pembangunan akhirnya akan dikucilkan oleh rakyat.

Konsesus kita bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”⁵, sebagai hak politik rakyat, banyak terkalahkan oleh hak hukum baru yang dimiliki oleh orang-orang yang kuat. Dari sini terjadi redistribusi pemilikan dan penguasaan aset ekonomi yang merugikan rakyat kecil. Adanya hak hukum baru berfungsi pula sebagai “*agent of moderation*” yang efektif. Hak hukum baru haruslah positif dan dinamis, yang muncul bukan sebagai suatu proses *zero-sum*, atau membawakan *trade off* yang merugikan orang kecil, hak hukum baru sesuai dengan cita-cita keadilan sosial.

Pembangunan ekonomi saat ini pada terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan

⁴ Panji Anuraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995), hal.180

⁵ UUD 1945 pasal 33 ayat 1.

kemakmuran dari seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial⁵

Secara khusus, perhatian yang harus diberikan dengan pemilahan dan pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan ekonomi rakyat, yaitu ekonomi usaha kecil, termasuk UED SP agar tidak makin tertinggal jauh. Kesenjangan ini merupakan masalah dalam pembangunan yang memerlukan pemecahan dengan pemihakan dan pemberdayaan bagi pelaku ekonomi lemah. Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan upaya terhadap peningkatan ekonomi rakyat, wujudnya adalah adanya langkah-langkah strategis untuk memperluas akses rakyat kepada sumberdaya pembangunan. Berdasarkan hal tersebut, maka perencanaan pembangunan harus memenuhi beberapa hal antara lain:

1. Benar-benar mencapai target sasaran penduduk, tempat kegiatan ekonominya.
2. Dapat memicu dan memacu kegiatan ekonomi rakyat.
3. Hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat.
4. Hasilnya dapat dilestarikan sendiri oleh rakyat setempat.⁶

Karenanya, membangun ekonomi usaha kecil menghilangkan kemiskinan, mendorong kemajuan wilayah-wilayah yang tertinggal dengan

⁵ Mohtar Mas'ud, *Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Rakyat*, (Majalah Prospektif, 1993), hal.10

⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), hal .46

berpedoman pada pemihakan dan pemberdayaan, menjadi agenda pembangunan pertama dalam ekonomi bertumpu pada trilogi pembangunan antara lain:

1. Stabilitas nasional yang mantap dan dinamis dalam bidang politik.
2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.
3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.⁷

Kaitannya dengan dakwah, UED SP merupakan bentuk kegiatan yang tergolong dalam dakwah bil hal. Sebab UED SP merupakan wadah perekonomian yang berperan mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memang posisinya lemah.

Di dalam ajaran Agama Islam mengajarkan tentang semangat solidaritas dan gotong-royong seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. (المائدة : 2)

Artinya :

Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, tetapi janganlah kalian tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan takutlah kalian kepada Allah karena sesungguhnya Allah itu sangat keras siksaan-Nya.⁸

Dalam ajaran Agama Islam menumbuhkan jiwa kegotong-royongan, kekeluargaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sangat dianjurkan agar tercipta sebuah kebersamaan dalam masyarakat.

⁷ Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Aditya Media, Cet.I, 1997), hal.171

⁸ Al-qur'an dan Terjemahannya, (Depag, Jakarta, 1997), hal. 157.

Dalam ajaran Agama Islam menumbuhkan jiwa kegotong-royongan, kekeluargaan dan bekerja sama untuk kepentingan bersama sangat dianjurkan agar tercipta sebuah kebersamaan dalam masyarakat.

Masyarakat Giwangan yang berlokasi di wilayah pinggiran Kota Yogyakarta masih nampak perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan dengan masyarakat pinggiran di wilayah Kota Yogyakarta lainnya meskipun akhir-akhir ini telah berdiri dengan megahnya sebuah Terminal Induk Tipe A sebagai pusat kegiatan mobilisasi massa dan ekonomi, namun meski demikian perkembangan perekonomian masyarakat giwangan khususnya pedagang kecil masih belum tampak kemajuannya, hal ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan modal untuk pengembangan kegiatan bisnis yang terbatas, sehingga praktis kegiatan bisnis hanya dikuasai oleh sebagian kecil penduduk asli Giwangan yang bermodal, kebanyakan justru dikuasai oleh pendatang bermodal besar yang mengembangkan bisnisnya di wilayah Giwangan

Masyarakat ekonomi lemah di Giwangan dan sekitarnya, mayoritas berprofesi sebagai pengusaha pedagang kecil, dalam pengembangan usahanya mereka kesulitan untuk mendapatkan modal, sementara modal yang diberikan oleh bank-bank umumnya, harus menggunakan jaminan, dengan persyaratan yang sulit dan dengan bunga yang besar. Selain itu pengusaha kecil di Giwangan, kurang memiliki manajemen yang bagus dalam melakukan usaha, mereka lebih bersifat tradisional, maksudnya mereka tidak memikirkan faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi naiknya nilai jual barang, bagaimana mengembangkan usahanya, serta meningkatkan kualitas barang, misalnya

sudah merasa untung walaupun apabila dihitung secara sistematis masih terlalu kecil. Sistem pemasaran yang berjalan juga masih menunggu pembeli datang bukan dengan mendatangkan pembeli, misalnya dengan mengadakan bazar atau kegiatan lainnya semacam promosi.

Sebagai salah satu lembaga keuangan formal diwilayah Giwangan UED SP “Lestari Makmur”, sangat berperan dalam penyediaan modal usaha kecil, sehingga kesemuanya itu memerlukan aspek legalitas dalam operasionalnya, karena UED SP akan berhubungan langsung dengan masyarakat, baik dalam menghimpun dana, maupun dalam memberikan pembiayaan kredit dengan persyaratan yang mudah, jaminan yang ringan dan bunga yang rendah, UED SP “Lestari Makmur” merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki komitmen untuk mengambil peran dalam memberdayakan ekonomi rakyat.

Keberhasilan suatu usaha tidak diukur dari besarnya laba yang diperoleh, akan tetapi bagaimana usaha itu bermanfaat untuk kepentingan umat yang diridloi oleh Allah SWT, dengan pola perilaku penuh kejujuran dan tujuan di bawah lindungan-Nya.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya yaitu: Bagaimana upaya UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat berekonomi lemah dan pedagang kecil Giwangan?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui upaya UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat ekonomi lemah dan pedangang kecil Giwangan.

E. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka hasil penelitian ini mempunyai kegunaan sabagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan acuan data awal untuk mendapatkan data-data lainnya yang lebih komprehensif di dalam penelitian masyarakat yang sama atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasaan yang ada dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi UED SP Lestari Makmur dalam mengembangkan ekonomi masyarakat.

F. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan dapat dikatakan jawaban atas realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Mereka yang tidak berdaya jelas adalah pihak yang tidak mempunyai daya atau kehilangan daya kekuatan. Dapat dikatakan mereka yang tidak berdaya adalah mereka yang kehilangan kekuatannya.⁹

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun

⁹ Team Work Lopera, *Politik Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Lopera Pustaka Utama, 2001), hal. 52

keberdayaan masyarakat yang bersangkutan.¹⁰ Di dalam masyarakat terdapatnya suatu unsur nilai-nilai intrinsik yang menjadi sumber keberdayaan yaitu kekeluargaan dan kegotong-royongan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Adapun arti memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.¹¹

Pada dasarnya proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan yaitu:¹² Pertama, proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan dan mengalihkan sebagian kekuasaan atau kekuatan dan kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan pemberdayaan yang berkaitan dengan kekuatan dalam memberdayakan masyarakat .

¹⁰ Ginanjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO, 1996), hal. 145

¹¹ Mubyarto, *Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Kumpulan Karangan 1996), hal. 21

¹² Ony S Priyono, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre For Strategic and International Studies, 1996), hal. 56

Perekonomian dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan atas demokrasi ekonomi termasuk bumi dan air dan kekayaan alam adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat dengan cara swadaya apa saja yang dapat dikuasainya setempat dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya. Sedangkan ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945, sila ke-4 dari Pancasila menyatakan, dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sistem perekonomian juga ditandai dengan adanya lembaga yang merupakan sebuah perkumpulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat.¹³

Pemberdayaan ekonomi lebih mengarah terhadap pengembangan ekonomi, sebab dalam membangun ekonomi harus meningkatkan kemampuannya dengan cara mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Upaya penerahan sumberdaya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya,¹⁴ dengan demikian rakyat ikut

¹³ Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), hal. 19

¹⁴ Mubyarto, *Op.Cit*, hal. 21

berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan. Pengembangan ekonomi rakyat dapat dilihat dari tiga sisi:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang
 - b. Memperkuat potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat itu.
 - c. Mengembangkan ekonomi rakyat juga mengandung arti melindungi rakyat.
2. Proses Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Ginanjari Kartasasmita, mengatakan bahwa:

Dalam pemberdayaan, dasar pandangannya adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat.¹⁵

Secara praktis upaya yang merupakan pengarah sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini akan meningkatkan produktifitasnya. Sehingga baik Sumber Daya Manusia, maupun Sumber Daya Alam disekitar keberadaannya dapat ditingkatkan produktifitasnya, dengan demikian rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis.

Pendekatan utama yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adalah pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak dijadikan obyek pembangunan sebagaimana lazimnya selama ini, dimana manusia hanya dijadikan sebagai tenaga kasar untuk

¹⁵ Ginanjari Kartasasmita, *Pemberdayaan Suatu Pengantar: Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi*, Malang: UNIBRAW, 1996. hal. 41.

mengurangi biaya pembangunan akan tetapi masyarakat dijadikan subyek yang ikut menentukan sukses tidaknya program yang dilaksanakan.

Sebagai subyek, masyarakat memiliki otoritas untuk merencanakan sendiri dan menentukan pilihan-pilihannya. Mereka dilibatkan secara aktif dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil. Proses pemberdayaan masyarakat melalui aktifitas sebagai berikut:

a. Pembentukan kelompok.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif. Namun pemberdayaan yang terkait dengan ekonomi, kemampuan individu senasib, untuk saling berkumpul dalam satu kelompok dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif. Dalam kelompok terjadi suatu dialog yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok. Mereka belajar untuk mendefinisikan masalah, menganalisa, serta merancang suatu solusi dalam memecahkan masalah tersebut.

b. Pendampingan.

Dalam proses mendefinisikan masalah, menganalisa, serta merancang sebuah kegiatan kelompok memerlukan pendamping yang berfungsi sebagai penstimulir atau pendoronga yang dapat meyakinkan kelompok akan potensi yang mereka miliki. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan penyelenggaraan kelompok sebagai fasilitator, komunitator maupun dinamisator. Dengan adanya

pendamping kelompok diharapkan tidak tergantung pada pihak luar namun dapat dibantu untuk tumbuh dan berfungsi sebagai suatu kelompok kegiatan yang mandiri. Pendamping berfungsi sebagai pemancing daya masyarakat atau kelompok sebelum akhirnya masyarakat dan kelompok sendiri yang berperan dalam mengatasi masalah yang mereka hadapi.

c. Perencanaan Kegiatan.

Pada tahap perencanaan kegiatan, peran aktif anggota kelompok untuk dapat menentukan bidang usaha yang dapat digarap sesuai dengan kemampuan agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dalam perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan, antara lain:

- 1). Prinsip kepercayaan, dalam masyarakat diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan jenis kegiatan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 2). Prinsip kebersamaan dan kegotong-royongan, pada prinsip ini program yang diciptakan harus mampu menumbuhkan kebersamaan kegotong-royongan, kesetiakawanan, dan kemitraan anggota kelompok.
- 3). Prinsip kemandirian, ekonomi dan berkelanjutan, prinsip ini menekankan program yang dapat mendorong rasa percaya diri bahwa masyarakat mampu untuk menolong dirinya. Program yang dipilih harus bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup anggota

kelompok, dan harus dapat berkembang secara berkesinambungan, sehingga pada saatnya tidak lagi diperlukan bantuan.¹⁶

Berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi umat, Musa Asy'ari mengatakan bahwa:

Institusi-institusi keagamaan perlu mendorong, dan kalau mungkin memberikan kesempatan kepada pemeluknya, supaya berlatih dan mempersiapkan dirinya untuk memilih peluang menjadi wirausaha.¹⁷

Dengan jalan memberikan pelatihan-pelatihan sebagai bekal yang amat penting ketika mereka akan memasuki dunia wirausaha. Program pembinaan berkelanjutan itu, dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:

- a. Pelatihan usaha, melalui pelatihan ini setiap peserta diberikan pemahaman terhadap konsep-konsep kewirausahaan dengan segala macam seluk beluk permasalahan yang ada di dalamnya.
- b. Pemagangan, pemagangan dalam bidang usaha ini diartikan sebagai pengenalan terhadap realitas usaha secara *intens* dan *empirik*. Pemagangan ini sangat perlu, karena suasana dan realitas usaha mempunyai karakteristik yang khas, yang berbeda dengan dunia pendidikan atau kegiatan di luar usaha.
- c. Penyusunan proposal, untuk memulai kegiatan usaha hal yang sering kali dilupakan adalah penyusunan proposal sebagai acuan dan target perkembangan usaha. Melalui penyusunan proposal ini juga

¹⁶ *Ibid.* hal. 50

¹⁷ Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: Lesfi, 1997) hal. 141.

memungkinkan untuk membuka jalinan kerjasama dengan berbagai lembaga perekonomian.

- d. Permodalan, permodalan dalam bentuk uang, merupakan salah satu faktor penting dalam dunia usaha, tetapi bukan yang terpenting. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang cukup stabil, perlu mengadakan hubungan kerjasama yang baik dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun dana bantuan yang disalurkan melalui kemitraan usaha lainnya.
- e. Pendampingan, tahap ini yaitu ketika usaha itu dijalankan, calon wirausaha di dampingi oleh tenaga kerja profesional, yang berfungsi sebagai pengarah sekaligus pembimbing, sehingga kegiatan usaha yang digelutinya benar-benar berhasil dikuasanya, bahkan mampu melaksanakan usaha-usaha pengembangan.
- f. Jaringan Bisnis, dengan melalui berbagai tahapan yang konsisten, sistematis dan berkelanjutan, maka upaya untuk melahirkan wirausaha sejati hanya menunggu waktu saja. Proses selanjutnya perlu dibentuk *net working* bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.¹⁸

Dengan berdasarkan teori di atas, nampak bahwa untuk memberdayakan ekonomi masyarakat desa, memerlukan proses yang panjang, dengan melalui beberapa tahapan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Lembaga yang ingin berhasil dalam mengembangkan

¹⁸ *Ibid.* hal. 144

aktivitasnya dalam rangka pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat, maka perlu menyusun program pembinaan yang dapat dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya berkesinambungan.

3. Pemberdayaan dan Partisipasi

Upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan adalah partisipasi aktif seluruh masyarakat melalui sebuah gerakan yang massif. Gerakan ini dilakukan untuk menghilangkan kesan bahwa upaya penanggulangan kelulusan "hanya" merupakan tanggung jawab pemerintah. Partisipasi aktif masyarakat juga menunjukkan bahwa mereka memiliki empati yang dibangun dari prinsip silih asah, silih asih, dan silih asuh. Kepedulian pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat melalui program Gerakan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (Gerakan Taskin) yang dicanangkan pemerintah sejak 1998. Gerakan Taskin merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan pemerintah, kalangan swasta, lembaga swadaya masyarakat (NGO), dan organisasi masyarakat, masyarakat luas, serta keluarga miskin itu sendiri.

Program tersebut dikembangkan atas dasar perspektif bahwa ekonomilah sebagai tujuan akhir yang dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perspektif, pembangunan sosial, sesungguhnya ekonomi harus ditempatkan sebagai cara (*means*) bukan sebagai tujuan akhir, sedangkan tujuan akhirnya (*ends*) adalah kualitas hidup manusia itu

sendiri.¹⁹ Dengan demikian setiap indikator keberhasilan harus dilihat manfaatnya terhadap peningkatan kualitas hidup manusia dan kemaslahatannya.

Paul mengatakan bahwa :

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya.²⁰

Pemberdayaan ini pada akhirnya akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih terpusat pada rakyat. Salah satu agen Internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di dunia ke tiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk menolong dirinya sendiri .

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah nmembiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini.

4. Akses Perkreditan

Kredit merupakan suatu perkataan yang diambil dari bahasa latin “*credo*” berarti saya percaya, dengan kata lain: kepercayaan pada

¹⁹ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1993), hal. 138

²⁰ *Ibid*, hal. 4

kemampuan seseorang untuk membayar. Kepercayaan ini didasarkan atas perjanjian. Jadi, adakalanya kredit dinyatakan hanya sebagai “janji untuk membayar uang” atau sebagai izin untuk menggunakan modal orang lain. Ini mengacu upaya seseorang untuk menggunakan barang dagangannya, seseorang dengan janji akan membayarnya kembali setelah barang dagangan itu laku. Kredit bank juga menggunakan sistem kepercayaan kepada seseorang untuk menggunakan dana bank sebagai modal dan deposito, sepertihalnya dengan kredit dari sumber lain.²¹

Dalam upaya memperkuat posisi perekonomian penduduk miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan, kredit seringkali dijadikan sebagai alat untuk membantu mereka. Asumsinya adalah pemberian kredit kepada kelompok miskin atau kelompok ekonomi lemah dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Salah satu lembaga yang mempunyai tugas menghimpun dan menyalurkan kredit kepada masyarakat adalah perbankan. Akan tetapi, dewasa ini lembaga keuangan komersial relatif tidak tertarik untuk mengembangkan mekanisme kredit bagi nasabah kecil. Hal ini pada gilirannya akan menyebabkan tingginya biaya transaksi yang harus dikeluarkan oleh bank.

Dalam tinjauan makro mengungkapkan bahwa sektor perkreditan telah berhasil mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perluasan bank, tingkat mobilitas dana dan nilai kredit yang disalurkan meningkat dengan angka-angka yang menakjubkan. Akan

²¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.30

tetapi, prestasi makro ini tidak diikuti dengan perkembangan pemberian perhatian kepada usaha rakyat. Sehingga situasi perkreditan berada dalam kondisi “optimisme makro dan pesimisme mikro”. Optimisme makro disandarkan kepada perkembangan ekonomi dan tingkat penyaluran kredit yang menunjukkan kecenderungan positif. Sedangkan pesimisme mikro bersandar pada kekhawatiran akan *default risk* dan biaya operasional penyaluran kredit yang dinilai tinggi, serta acuan filosofi dan legalitas yang masih bertahan pada prinsip-prinsip konvensional.

F. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian²². Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum²³.

1. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan.²⁴ Subyek penelitian dalam hal ini adalah berupa dokumen, arsip dan sebagainya tempat peneliti membaca dan mempelajari sesuatu yang berhubungan dengan data-data

²² Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 42

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 3

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 16

penelitian. Juga informan yang akan dimintai informasinya tentang obyek yang diteliti, para *key informan* itu adalah :

- 1). Pimpinan, pegawai dan nasabah UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Giwangan.
- 2). Disamping itu pihak-pihak yang paham dengan penelitian ini juga sebagai informan, artinya penelitian ini tidak menutup kemungkinan pada pihak-pihak yang memiliki informasi.

Sedangkan obyek penelitian adalah apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini yaitu proses pemberdayaan ekonomi masyarakat Giwangan.

2. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data adalah cara yang dipakai oleh peneliti dalam rangka memperoleh data yang lengkap, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dalam pengumpul data yang relevan dengan peneliti yaitu dengan menggunakan metode :

a. Metode Interview

Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi data wawancara. Bentuk wawancara yang dipakai adalah interview semi-terstruktur. Wawancara ini bersifat bebas dalam arti *interviewer* hanya menggunakan pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.16

yang ditanyakan. Dengan demikian, pedoman yang digunakan adalah pedoman tidak berstruktur dan interview secara mendalam. Secara fungsional interview dapat dibagi kedalam tiga golongan besar yaitu sebagai metode primer, sebagai metode sekunder dan sebagai metode kriterium. Penulis menempatkan interview sebagai metode primer, artinya interview mempunyai kedudukan yang utama dalam menggali data berupa gambaran umum UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi serta melaksanakan program kegiatan menurut aturan yang telah ditetapkan, sumber informasi diperoleh dari:

- 1). Pimpinan UED SP “Lestari Makmur”.
- 2). Pegawai UED SP “Lestari Makmur”.
- 3). Masyarakat Giwangan yang menjadi nasabah UED SP “Lestari Makmur”.

b. Metode Observasi

Dalam observasi ini diusahakan mengambil keadaan yang wajar dan sebenarnya, tanpa usaha yang sengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau memanipulasikannya.²⁶

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan observasi non partisipan, artinya peneliti tidak terlibat langsung, maksudnya hanya mengamati saja. Dengan metode ini diharapkan untuk mengetahui realita sesungguhnya dilapangan, mengenai partisipasi anggota UED SP “Lestari Makmur” dalam ikut serta

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.*, hal.120

melaksanakan program kegiatan yang telah ditetapkan, serta aturan-aturan yang telah ditentukan.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu; cara memperoleh data dengan melihat dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain: dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.²⁷ Data ini untuk mendukung atau melengkapi data-data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Penulis menggunakan metode dokumentasi adalah untuk memperoleh data berkenaan dengan

- 1). Sejarah perkembangan UED SP “Lestari Makmur”.
- 2). Tujuan dan Sasaran UED SP “Lestari Makmur”.
- 3). Struktur organisasi UED SP “Lestari Makmur”.
- 4). Program kegiatan yang dilaksanakan UED SP “Lestari Makmur”.
- 5). Data simpan pinjam masyarakat sebagai upaya yang dilakukan UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Giwangan .

3. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong, langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data, sebagai berikut:²⁸

a. Reduksi Data

²⁷ *Ibid*, hal. 202

²⁸ Lexy.J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hal.190

Reduksi data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk merangkum data, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari tema dan polanya dan reduksi data selanjutnya dilakukan dengan membuat abstraksi.

b. Deskripsi Data

Deskripsi data dalam penelitian ini yakni menguraikan segala sesuatu yang terjadi dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hasil yang dicapai UED SP “Lestari Makmur” dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Giwangan. Pendeskripsian ini dilakukan berdasarkan apa yang dilihat atau diperoleh selama penelitian.

c. Pengambilan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan disusun selanjutnya dibuat kesimpulan.

Ketiga langkah dalam menganalisis data tersebut menjadi acuan dalam menganalisis data-data dapat tercapai suatu uraian sistematis, akurat, dan jelas.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas, dapat dipetik sebuah kesimpulan, yaitu ;

1. Proses pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh UED SP Lestari Makmur, meliputi usaha-usaha untuk memberdayakan masyarakat Giwangan khususnya pedagang kecil dan petani, dengan memberikan kredit dan tabungan serta memberikan peningkatan pemberdayaan Sumber Daya Manusianya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada kegiatan sosial, keagamaan dan kewirausahaan, sehingga akan dapat mengentaskan masyarakat Giwangan dari kemiskinan. Hal ini sesuai dengan pendapatnya Ginanjar Kartasmita mengenai, proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:
 - a. Pembentukan Kelompok
 - b. Pendampingan
 - c. Perencanaan Kegiatan
 - d. Permodalan
 - e. Jaringan Bisnis

Mengenai pemberdayaan juga telah sesuai dengan yang disampaikan Mubyarto, dalam bukunya yang berjudul, Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan,

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat

Dan juga sesuai dengan perkataan Gregory Grossman, dalam bukunya yang berjudul Sistem-sistem Ekonomi, yaitu

Sistem perekonomian juga ditandai dengan adanya lembaga yang merupakan sebuah perkumpulan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat

2. Peran aktif masyarakat dalam berpartisipasi mampu mendorong tercapainya tujuan UED SP Lestari Makmur dan semua usaha, kegiatan yang diadakan UED SP Lestari Makmur dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, karena partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi dan sosial masyarakat.

B. SARAN-SARAN

1. Dengan melihat antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan UED SP Lestari Makmur, penulis berharap agar UED SP Lestari Makmur dapat lebih menggiatkan lagi kegiatannya, seperti bimbingan tentang pengembangan usaha dan pelatihan-pelatihan ketrampilan kerja lebih sering

diadakan, mengingat masih banyak masyarakat ekonomi lemah yang kurang dan belum mempunyai ketrampilan kerja.

2. Dalam melaksanakan kegiatan pengajian, diharapkan UED SP Lestari Makmur dapat lebih banyak menyampaikan materi-materi yang beragam, yang tidak hanya dapat meningkatkan perekonomian tetapi juga dalam pengelolaannya dipastikan sesuai dengan syariat Islam. Dan pengajian ini tidak hanya dapat dilakukan sebulan sekali, tetapi dapat dilakukan sebulan dua kali atau seminggu sekali dengan materi dan nara sumber yang berbeda.
3. Dengan bertambahnya modal dan pendapatan, diharapkan UED SP Lestari Makmur lebih bisa membantu masyarakat ekonomi lemah dalam mengatasi masalah perekonomian dengan cicilan pengembalian yang lebih ringan dan bunga yang lebih kecil lagi. Dan dapat memberikan bantuan tidak hanya pada masyarakat Giwangan tetapi masyarakat sekitar Giwangan yang lebih luas (jauh).
4. Bagi para nasabah UED SP Lestari Makmur, diharapkan kesadarannya dalam membayar setoran kredit (pinjaman), tidak terlambat dan selalu aktif melakukan pembayaran, sehingga modal dapat segera diputar kembali.

C. KATA PENUTUP

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Seru sekalian alam, karena atas petunjuk serta pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Segala usaha dan kemampuan kami curahkan untuk dapat tersusunnya skripsi ini secara maksimal, namun kami sadar dan menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan yang ada. Untuk itu kritik dan saran yang konstruktif tetap kami harapkan. Semoga menjadi motifator dalam mengerjakan karya-karya ilmiah lainnya.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini, dengan harapan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi semua pihak yang berkepentingan dengan skripsi ini pada umumnya.

Akhirnya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT. Semoga maksud dan tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai, Amin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, 1997.
- Arifin Noor , *Ilmu Sosial Dasar, Untuk IAIN Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*, Bandung, CV. Pustaka Setia ,1997.
- Ginanjart Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta, PT. Pustaka CESINDO, 1996.
- _____, *Pemberdayaan Suatu Pengantar: Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi*, Malang: UNIBRAW, 1996.
- Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1998.
- Gregory Grossman, *Sistem-sistem Ekonomi*, Jakarta, Bumi Aksara, 1984.
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung, Humaniora Utama Press, 1993.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1996.
- Ma'ruf WS, *Muhammadiyah dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Mohtar Mas'ood, *Ekonomi Politik Pembangunan dan Pemberdayaan Rakyat*, Majalah Prospektif, 1993.

Mubyarto, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*,
(Yogyakarta, Aditya Media, Cet. I, 1997.

_____, *Pengembangan Ekonomi Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan*,
Jakarta, Kumpulan Karangan, 1996.

Musa Asy'ari, Islam, *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta:
Lesfi, 1997.

Ony S Priyono, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, Centre
For Strategic and International Studies, 1996.

Panji Anuraga, Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta,
PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*, Jakarta: Rineka Cipta,
1998.

_____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta, Rineka Cipta, 1998.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta, Andi, 2002.

Team Work Lapera, *Politik Pemberdayaan*, Yogyakarta, Lapera Pustaka Utama,
2001.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA